

# DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014-2018

Siti Maysaroh

Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univertias Muhammadiyah Yogyakarta

[esmaysaroh22@gmail.com](mailto:esmaysaroh22@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to know the influence of Human Development Index (HDI), Labor Force Participation Rate, Gross Domestic Product per capita (GDP Per Capita) and Population toward Income Inequality in West Java Province in 2014-2018. This research used secondary data panel of cross section (27 regencies/municipalities in the Province of West Java) and time series (2014-2018). Whereas the FEM (Fixed Effect Model) approach were used to estimate the regression model. Regression result show that the variables Human Development Index (HDI) and Population have negative and significant influential toward on income inequality between regions, GDP per capita have positive and significant influences toward on income inequality between regions, and Labor Force Participation Rate have negative and not significant influences toward on income inequality between regions.*

**Keywords:** *Income Inequality, Human Development Index, Labor Force Participation Rate, GDP Per capita, Population.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB Perkapita, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang terdiri dari *cross section* (27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat) dan *time series* (2014-2018). Metode pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi ini adalah pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah, PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk.

## PENDAHULUAN

masyarakat. Salah satu tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan ekonomi merupakan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya suatu proses yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan meratanya distribusi kenaikan pendapatan rill per kapita penduduk pendapatan (Arsyad, 2015).

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu negara dalam jangka panjang dengan Ketimpangan pendapatan merupakan disertai oleh perbaikan sistem dan salah satu masalah yang sering terjadi dalam kelembagaan. Tujuan pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi dan dapat terjadi adalah menciptakan kesejahteraan ketika kondisi dimana distribusi pendapatan

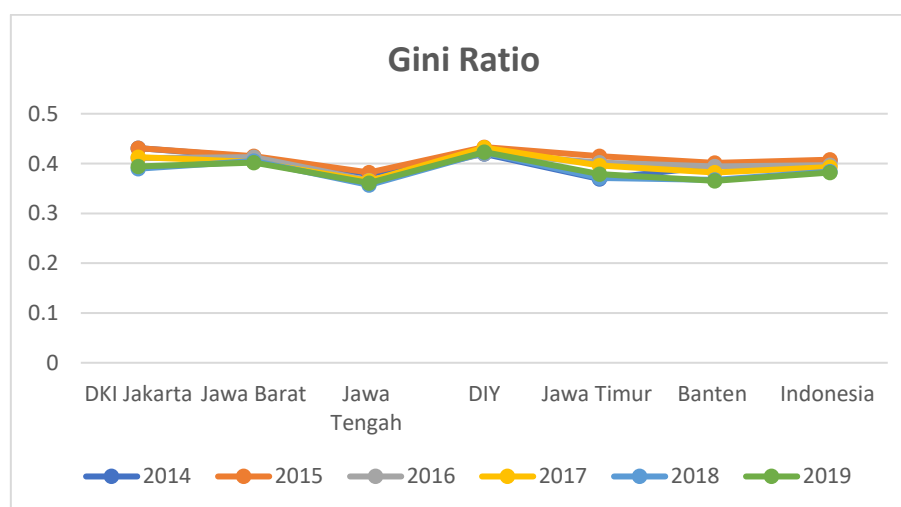
yang diterima oleh masyarakat tidak merata. Ketimpangan wilayah juga dapat disebabkan oleh karena adanya perbedaan demografi yang cukup besar antar wilayah. Kondisi demografi ini seperti perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan daerah, perbedaan tingkat kesehatan dan pendidikan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku, dan perbedaan dalam etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografi yang baik cenderung akan meningkatkan produktivitas kerja. (Syafrizal, 2012).

Masalah fundamental yang dihadapi oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah ketimpangan, dimana terdapat kecenderungan bahwa ketimpangan ini meningkat sepanjang waktu. Terdapat daerah dengan pendapatan yang tinggi (Kabupaten Bekasi) dan daerah yang pendapatan relative rendah (Kota Bekasi). Peningkatan ketimpangan ini disebabkan oleh pola pembangunan yang berbeda antardaerah.

**Tabel 1**  
**Gini Ratio Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2018**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	0,431	0,431	0,411	0,413	0,390	0,394
<b>Jawa Barat</b>	<b>0,413</b>	<b>0,415</b>	<b>0,413</b>	<b>0,403</b>	<b>0,405</b>	<b>0,402</b>
Jawa Tengah	0,379	0,382	0,366	0,365	0,357	0,361
DIY	0,419	0,433	0,420	0,432	0,422	0,423
Jawa Timur	0,369	0,415	0,402	0,396	0,371	0,379
Banten	0,395	0,401	0,394	0,382	0,367	0,365
Indonesia	0,406	0,408	0,397	0,393	0,384	0,382

Sumber : Badan Pusat Statistik



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1. Gini Ratio Tahun 2014-2019**

Berdasarkan table 1 merupakan perkembangan nilai indeks rasio pada Provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka ketimpangan yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 angka ketimpangan di Provinsi Jawa Barat menduduki urutan kedua setelah Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai indeks ratio sebesar 0,405, ketimpangan ini masih diatas ketimpangan Indonesia sebesar 0,384. Sedangkan nilai indeks ratio terendah berada di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 0,357. Terdapat tiga Provinsi dengan nilai indeks ratio diatas angka nasional pada tahun 2018 sebesar 0,384, yaitu tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,422, Jawa barat (0,405), DKI Jakarta (0,390).

Ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh perubahan tingkat kemakmuran dari waktu ke waktu. Pencapaian PDRB per kapita digunakan

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Disuatu daerah dengan IPM yang tidak merata dapat menyebabkan daerah yang angka IPMnya tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik serta dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. Menurut Todaro (2011) menjelaskan IPM atau *Human*

sebagai indikator pembangunan dan untuk melihat seberapa besar tingkat kemakmuran suatu wilayah. Tingginya PDRB per kapita suatu daerah akan menyebabkan meningkatnya potensi sumber penerimaan daerah karena pendapatan masyarakat dalam daerah tersebut semakin besar (Simanjutak, 2001). Hal ini dapat diartikan semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka akan semakin sejahtera penduduk daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan dan merata antar wilayah maka ketimpangan pendapatan akan berkurang.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ke 5 dari 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa. Angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 3,87 persen.

*Development Indeks* (HDI) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasi pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Dengan kata lain IPM yang tinggi mampu mengurangi tingkat ketimpangan pada masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat serta sumber lain yang terkait dengan studi ini.

Daerah penelitian yang digunakan adalah 28 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamson (ketimpangan pendapatan) sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB per kapita, dan Jumlah Penduduk.

### **Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi Data Panel. Menurut Basuki (2017), dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Model *Pooled Least Square (Common Effect Model)*

Model ini biasanya lebih dikenal dengan estimasi *Comon Effect* yang merupakan pendekatan model dengan teknik data panel yang paling sederhana dengan mengestimasi data panel menggunakan cara penggabungan data *cross section* dan *time series*. Pada model ini mengkombinasikan data tanpa

memperhatikan perbedaan waktu maupun individu, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ini dapat menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

#### 2. Model Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Model pendekatan ini menggunakan teknik *variable dummy* atau yang sering disebut sebagai efek tetap (*fixed effect*) atau teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*. Pada model ini estimasi yang dilakukan dengan pembobotan *no weight* atau *Least Squares Dummy Variable (LSDV)* serta dengan pembobotan *cross section weight* atau *General Least Square (GLS)*. Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi adanya heterogenitas unit *cross section* (Gujarati, 2006). Pemilihan model yang akan digunakan untuk melihat bagaimana perilaku dari masing-masing variabel sehingga data yang digunakan lebih dinamis pada saat menginterpretasikan data.

#### 3. Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Model ini digunakan untuk mengestimasi data panel dimana terdapat hubungan antara variabel gangguan dengan antar waktu dan antar individu. Perbedaan intersep dalam model *Random Effect*

diakomodasi oleh *error terms* masing-masing unit. Penggunaan model *Random Effect* memiliki keuntungan yaitu dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Sehingga model ini juga disebut sebagai *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Keputusan penggunaan model efek tetap ataupun acak ditentukan dengan menggunakan uji Hausman. Dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha (0,05) maka dapat digunakan metode *Fixed Effect* namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu model yang terbaik antara Model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis pada tabel 2 memperlihatkan bahwa metode estimasi yang terpilih adalah *Fixed Effect*. Dipilihnya *Fixed Effect* karena memiliki nilai probabilitas masing-masing variabel independent dari *Fixed Effect* lebih signifikan dibanding dengan *Random Effect*. Nilai koefisien determinasi dari model *Fixed Effect* lebih tinggi dibandingkan dengan *Random Effect* sehingga model yang terbaik dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effect*. Setelah terpilih metode *Fixed Effect*, kemudian dilanjutkan dengan melakukan regresi *Fixed Effect*.

Hasil estimasi menunjukkan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan

**Tabel 2.**  
**Hasil Estimasi Pemilihan Model**

Variabel Dependen : IW	Model	
	<i>Fixed Effect</i>	<i>Random Effect</i>
<b>Konstanta C</b>	0.354904	-1.467958
Standar Error	0.527313	0.272639
Probabilitas	0.5024	0.0000
<b>IPM</b>	-0.007946	-0.010571
Standar Error	0.001576	0.001258
Probabilitas	0.0000	0.0000
<b>TPAK</b>	-1.06E-05	-0.154E-05
Standar Error	8.14E-05	8.13E-05
Probabilitas	0.8962	0.8500
<b>LOG(PDRBKAP)</b>	0.121576	0.128899
Standar Error	0.018589	0.016017
Probabilitas	0.0000	0.0000
<b>LOG(JP)</b>	-0.125242	0.008206
Standar Error	0.036103	0.015198
Probabilitas	0.0008	0.5902
<b>R<sup>2</sup></b>	0.997470	0.330928
<b>F-statistic</b>	1366.767	16.07474
<b>Prob (F-stat)</b>	0.000000	0.000000
<b>Durbin-Watson Stat</b>	0.598059	0.504025

Sumber : *Output Eviews 7.0*

diperoleh nilai koefisien sebesar -0,007946 dengan signifikansi 0,0000 artinya IPM < 0,05 maka IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat memiliki hubungan negatif. Hal ini sesuai dengan Teori *Human Capital* yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi dispartasi pendapatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ilham Pangaribowo (2016) dan Masruri (2016) dimana IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin meningkatnya IPM maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Variabel dependen: Indeks Williamson	<i>Fixed Effect Model</i>
<b>Konstanta C</b>	0.354904
Standar Error	0.527313
Probabilitas	0.5024
<b>IPM?</b>	-0.007946
Standar Error	0.001576
Probabilitas	0.0000
<b>TPAK?</b>	-1.06E-05
Standar Error	8.14E-05
Probabilitas	0.8962
<b>LOG(PDRBKAP?)</b>	0.121576
Standar Error	0.018589
Probabilitas	0.0000
<b>LOG(JP?)</b>	-0.125242
Standar Error	0.036103
Probabilitas	0.0008
<b>R<sup>2</sup></b>	0.997470
<b>F-statistic</b>	1366.767
<b>Prob (F-stat)</b>	0.000000
<b>Durbin-Watson Stat</b>	0.598059

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,0000106 dengan signifikansi 0,8962 artinya TPAK > 0,05 maka PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh TPAK terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat memiliki hubungan negatif secara tidak signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hartono (2010) bahwa hasil rasio angkatan kerja berpengaruh negatif dan tetapi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan juga sejalan dengan penelitian Masruri (2016) bahwa TPAK tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan data perkembangan TPAK di Provinsi Jawa Barat bergerak secara fluktuatif dan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada periode 2014-2018 angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan ketimpangan. Hal ini diduga terjadi karena periode waktu yang digunakan penelitian yang tidak terlalu lama sehingga komponen TPAK seperti angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berkurangnya angkatan kerja dan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja dapat mengakibatkan nilai TPAK yang fluktuatif atau berubah-ubah memiliki

hubungan yang tidak signifikan terhadap penurunan ketimpangan di Provinsi Jawa Barat, yang berarti di Provinsi Jawa Barat TPAK masih belum bisa mempengaruhi secara signifikan pada periode tahun 2014-2018.

Pengaruh PDRB per kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,121576 dengan signifikansi 0,0000, artinya probabilitas PDRB perkapita  $> 0,05$  maka PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat memiliki hubungan yang positif.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosa dan Sovita (2016) yang melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Memperoleh hasil bahwa variabel PDRB per kapita, penduduk, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam hal ini juga sesuai dengan Teori Kuznet bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan diperoleh koefisien sebesar -0,125242 dengan signifikansi sebesar 0,0008 artinya Jumlah Penduduk  $< 0,05$  maka Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat adalah negatif.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesa awal yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun demikian hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Ananda (2019) dimana jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diartikan semakin bertambah jumlah penduduk maka akan meningkatkan pertumbuhan PDRB. Disamping itu dengan penambahan jumlah penduduk justru akan mengurangi dispartasi pendapatan antar wilayah. Hal ini dilandasi karena penambahan jumlah penduduk akan lebih memiliki dampak yang besar bagi lapangan pekerjaan yang akan berimbas pada kenaikan PDRB di suatu daerah. Dengan keseimbangan penawaran tenaga kerja

yang semakin tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang ada maka penambahan jumlah penduduk akan memberikan kesempatan yang baik bagi peningkatan ekonomi suatu daerah sehingga dapat mengurangi disparitas pendapatan antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis regresi data panel dan pembahasan tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB Perkapita, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan (Indeks Williamson) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa variabel IPM dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan TPAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018.

### SARAN

Beberapa saran yang diajukan yang sesuai dan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah : (1) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai *human capital investment* sehingga semakin baiknya

kualitas sumberdaya manusia, (2) Perlunya penyediaan kesempatan kerja yang luas, sehingga untuk mengurangi pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (3) Perlunya untuk peningkatan program-program pemerintah yang lebih fokus kepada masyarakat golongan ekonomi rendah sehingga pemerataan pendapatan akan tercapai. (4) Perlunya peran pemerintah untuk memanfaatkan ledakan jumlah penduduk atau demografi. Hal ini dikarenakan terdapat potensi sumber daya ekonomi berupa tenaga kerja yang produktif sehingga dapat memberikan rangsangan untuk menggerakkan perekonomian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Basuki, A, T. (2017). *Ekonometrika dan Aplikasi Dalam Ekonomi (Pertama)*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Gujarati, D., & Dawn, P. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, B. (2008). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang*.
- Hudiyanto. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Lingkar Media.



- Ilham, M., & Pangaribowo, H. . (2015). *Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015*.
- Masruri. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPAK, dan Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Jurnal Ilmiah*.
- Mulyadi. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. . (2015). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 06(2), 255–285.
- Setyawan, R., & Ananda, C. . (2015). Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Dispartasi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Todaro, M. ., & Smith, S. . (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.


**SKRIPSI**

**DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA  
BARAT TAHUN 2014-2018**

***DETERMINANT OF INCOME INEQUALITY IN THE WEST JAVA  
PROVINCE IN 2014-2018***



Telah disetujui  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si.  
NIK: 19640723199303 143 022

Tanggal: 03 Januari 2020